

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka mengkaji mengenai teori kepustakaan yang menjelaskan penelitian agar mendukung beberapa rumusan masalah sebagai landasan yang dipakai selanjutnya dengan analisis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Materi yang disajikan dalam rumusan masalah ini yaitu, tentang Administrasi Publik, Teori organisasi, Kelembagaan, Koordinasi, Manajemen dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai landasan teori menyampaikan kerangka berpikir dan proposisi

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya peneliti dalam rangka mencari bandingan dalam suatu penelitian. Kajian penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam memposisikan serta menunjukkan orisinalitas sebuah penelitian. Kajian penelitian terdahulu juga dapat membantu peneliti untuk menemukan inspirasi baru, walaupun lokasi dan masalahnya tidak sama persis tetapi itu sangat membantu peneliti agar bisa menemukan sumber-sumber pemecahan masalah dalam penelitian.

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

NO	1	2	3	4	5	6
Nama (Name)	Intan Priska Wardani & Sasmito	Arief Rachman Hakim & Fernandes Simangus on	Gunawan Widjaja, Handojo Dhanudib roto	Wawan Mulyawa	Muh. Nurhamdan, Muhammd Tahir, Nasrullhaq	Rismawati
Jenis Luaran Laporan Penelitian	Artikel Jurnal Ilmiah dipublikasi kan dalam Jurnal Aplikasi Adminstras	Artikel Jurnal Ilmiah	Artikel Ilmiah / Kajian Literatur	Artikel Ilmiah Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat	Laporan Penelitian (Artikel ilmiah)	Skirpsi
Tahun	2022	2021	2025	2023	2021	2026
Universitas (University)	Universitas Hang Tuah	Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)	Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta	Universitas Mbojo Bima, Kota Bima – NTB	Universitas Muhmmadiyah Makassar	Universitas Pasundan
Judul (Title)	Koordinasi Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Wonokusm, Kota Surabaya	Koordinasi Pemerintahan dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan selatan	Koordinasi Antar-Lembaga Pemerintah dan Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan	Koordinasi Antar Lembaga Desa Rato Kecamatan Waho Kabupaten Bima	Koordinasi antara Lembaga Pemerintahan dalam Menangani Sanksi Tilang Kendaraan Parkir Liar di Kota Makassar	Koordinasi Kelembagaan pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi
Latar Belakang Historis (Historical Background)	kemiskinan yang merupakan kondisi keterbatasan ekonomi sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan	kemiskinan merupakan persoalan struktural yang telah lama dihadapi pemerintah Indonesia dan menjadi dasar lahirnya berbagai	Koordinasi dalam pemerintahan merupakan fondasi dasar bagi terciptanya sinergi kelembagaan sejak era sentralisasi	Desa merupakan satuan terkecil yang menjadi ujung tombak implementasi kebijakan pembangunan. Berbagai perangkat lembaga desa	Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki	Koordinasi antar Lembaga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan unsur pelaksana di bidang

	dasar dan menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Selain itu, kemunculan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 buruk kondisi sosial ekonomi masyarakat karena akibat pemutusan hubungan kerja. Pemerintah kemudian merespon melalui berbagai kebijakan bantuan sosial, salah satunya Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bertujuan meringankan beban masyarakat terdampak pandemi serta menjaga kesejahteraan sosial sesuai amanat nasional..	kebijakan perlindungan sosial. Salah satu kebijakan tersebut adalah pemanfaatan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD), yang secara khusus diperkuat melalui regulasi pemerintah pusat sejak terjadinya pandemi COVID-19. Kebijakan ini menandai pergeseran penggunaan dana desa dari perlindungan sosial, yang pelaksanaannya menuntut keterlibatan dan koordinasi lintas organisasi pemerintahan dari tingkat pusat hingga desa	pemerintahan Indonesia. Namun, seiring diberlakukannya otonomi daerah pasca reformasi, peran koordinatif lintas lembaga menjadi semakin kompleks karena distribusi kewenangan dan perbedaan orientasi kelembagaan. Khususnya dalam kebijakan kesejahteraan yang menuntut kolaborasi antara banyak aktor—baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 mengklasifikasi koordinasi menjadi tiga: fungsional, instansional, dan teritorial. Masing-masing menghadapi tantangan	seperti LPMD, BPD, PKK, dan Karang Taruna berperan sebagai pelaksana, mitra, dan penggerak di tingkat lokal. Namun, sering kali perencanaan dan pelaksanaan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh karena lemahnya koordinasi lintas lembaga desa. Hal ini menyebabkan fragmentasi program, tumpang tindih kegiatan, dan kesenjangan kepentingan antar pemangku kepentingan lembaga dalam desa sebagai fondasi manajemen partisipatif.	kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan sektor publik, termasuk transportasi dan lalu lintas. Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan berkembang pesat, menghadapi tekanan urbanisasi dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang signifikan. Pertumbuhan ini berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan lahan parkir, yang jika tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 diterbitkan sebagai bentuk regulasi terhadap pengelolaan parkir di tepi	kesejahteraan sosial yang bertugas membantu pemerintah dalam pelaksanaan berbagai program sosial pada tingkat kecamatan. Keberadaan TKSK menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan sosial karena berperan sebagai penghubung antara pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, ditemukan beberapa indikasi permasalahan yang berkaitan dengan koordinasi kelembagaan di Kecamatan Tambelang dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
--	--	---	--	---	---	---

			seperti duplikasi peran, ketumpangtindihan kebijakan, dan pemborosan anggaran apabila tidak terkoordinasi dengan baik.		jalan umum. Akan tetapi, peraturan ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah praktik parkir liar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan institusional yang lebih baik melalui koordinasi lintas lembaga pemerintah.	masih dihadapkan pada berbagai kendala, di mana salah satunya adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Masalah ini menjadi isu krusial karena berkaitan erat dengan keadilan dalam distribusi bantuan.
Konteks Kekinian terkait dengan topik (Current Context)	Koordinasi yang dilakukan dinas sosial implementasi sering muncul kendala seperti ketidaktepatan data penerima, kesalahan administrasi, hingga potensi wewenang akibat proses verifikasi yang panjang antar instansi.	Koordinasi pemerintahan dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dapat berjalan tepat sasaran di tengah kondisi darurat pandemi COVID-19.	.Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah mendorong melakukan reformasi dalam bentuk <i>egovernance</i> , pelayanan terpadu satu pintu, serta forum koordinasi lintas lembaga.	Koordinasi antar lembaga pemerintah desa dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan berbasis masyarakat (bottom-up planning).	Koordinasi antara Lembaga Pemerintah dalam Menangani Sanksi Tilang Kendaraan Parkir Liar di Kota Makassar Masalah parkir liar bukan hanya mengganggu ketertiban lalu lintas tetapi juga menyebabkan kerugian pendapatan daerah, mengurangi kapasitas jalan, dan Dinas Perhubungan	Koordinasi kelembagaan dalam penyaluran BLT menjadi isu penting karena masih ditemukan ketidaksesuaian data penerima, keterlambatan pertukaran informasi, dan perbedaan hasil verifikasi antar lembaga yang berdampak pada ketepatan sasaran bantuan.
Teori-teori yang telah dan sedang	Penelitian ini menggunakan teori	Penelitian ini menggunakan teori	Penelitian ini menggunakan Teori	Penelitian ini menggunakan teori Menurut	Penelitian ini Menggunakan Teori Menurut	Penelitian ini menggunakan Teori menurut

di pergunakan peneliti lain (Theories Underpinnig)	koordinasi dari James D. Thompson yang menekankan tiga bentuk saling ketergantungan organisasi, yaitu ketergantungan menyatu, berurutan, dan timbal balik. Koordinasi dipahami sebagai proses meng integrasi kan unsur organisasi agar dapat bekerja secara harmonis.	koordinasi menurut Handayaning yang menyatakan bahwa koordinasi mencakup lima indikator utama, yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, serta kontinuitas perencanaan.	Koordinasi Fungsional (PP No. 6 Tahun 1988) Membagi koordinasi dalam tiga bentuk: fungsional, instansional, dan teritorial yang disesuaikan dengan skala dan tanggung jawab kebijakan.	Gulick (1937), koordinasi merupakan fungsi manajerial yang meng integrasikan kegiatan- kegiatan organisasi agar tidak terjadi duplikasi maupun konflik antar departemen. .	Terry (dalam Torang, 2014), koordinasi adalah strategi efektif mencapai sinergi antar elemen organisasi. Adapun Tunggal (2010) menyatakan bahwa komunikasi adalah	Mintzberg dalam Sumiati, buku hasil desertasi berjudul Koordinasi Antar Lembaga Pengelola Transportasi Publik di Kota Bandung (2022:22) Mekanisme koodinasi Mint zberg dalam S umiati (2022:25-26) antara lain: 1. Penyesuaian bersama 2. Pengawasan langsung 3. Standarisasi proses pekerjaan 4. Standarisasi hasil kerja 5.Standarisasi Keterampilann
Menduduka n terminologi- terminologi yang relevan yang dipergunaka n dalam berbagai penelitian sejenis (Terminolog y) Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka. Penelitian dilakukan melalui penelaahan literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, hasil	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan pendekatan partisipatif. Tahapan kegiatan antara lain: Koordinasi:	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang menekankan pada pengalaman subjektif pelaku lapangan dalam kegiatan koordinasi.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang menekankan pada pengalaman subjektif pelaku lapangan dalam kegiatan koordinasi.

	aparatur kelurahan, pihak Dinas Sosial, serta. Koordinasi: Proses penyelarasan aktivitas antar lembaga untuk mencapai tujuan bersama. - Bantuan Sosial Tunai (BST): Bantuan uang tunai dari pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan terdampak krisis. Interdependensi Ketergantungan antar unit organisasi dalam pelaksanaan tugas. Pedoman Teknis (Juknis) Instruksi operasional sebagai acuan pelaksanaan program.	dokumentasi. penelitian ini meliputi: Koordinasi pemerintahan ,yaitu pengaturan hubungan kerja antar pejabat dan instansi pemerintah yang saling terkait untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yaitu bantuan tunai yang bersumber dari Dana Desa untuk keluarga miskin dan rentan terdampak pandemi. Faktor pendukung dan penghambat koordinasi, yaitu kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas koordinasi	penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan yang terkait dengan koordinasi antar-lembaga pemerintah dan efektivitas kebijakan kesejahteraan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifika si pola, temuan utama, dan faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antara koordinasi dan efektivitas kebijakan	Proses menyelaraskan kegiatan dari berbagai unit atau lembaga untuk mencapai tujuan yang sama tanpa tumpang tindih. Dalam konteks desa, ini mencakup sinkronisasi antara lembaga seperti LPMD, BPD, dan PKK. Desa Mus bangdes Forum partisipatif untuk menyusun rencana berdasarkan aspirasi masyarakat. Koordinasi antar lembaga sangat menentukan kualitas keputusan.	Koordinasi Proses integratif dan komunikasi antara dua atau lebih lembaga untuk mencapai tujuan tertentu secara kolektif.	dalam bantuan sosial, BLT, komunikasi antar lembaga, verifikasi data, ketepatan sasaran, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik.
--	---	---	---	--	--	---

Perjelasan bukti-bukti terkait pentingnya topik riset ini (Significant) Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini signifikan karena membuktikan memberikan empiris bahwa koordinasi lintas lembaga memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang didukung oleh komunikasi yang baik dan pembagian peran yang jelas mampu meminimal kesalahan data dan konflik di lapangan. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa koordinasi yang efektif, pelaksanaan kebijakan publik berpotensi mengalami keterlambatan dan ketidaktepatan sasaran. Oleh	Hasil penelitian ini signifikan karena membuktikan koordinasi pemerintahan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penyaluran BLT Dana Desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi, perbedaan persepsi, serta keterbatasan kapasitas aparatur desa dapat menghambat efektivitas program bantuan. Oleh karena itu, penelitian ini signifikan sebagai rujukan dalam kajian koordinasi lintas lembaga, khususnya dalam implementasi kebijakan perlindungan sosial di tingkat	Hasil penelitian Topik koordinasi antar-lembaga pemerintah dan efektivitas kebijakan kesejahteraan memiliki signifikansi yang kuat karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi sering menimbulkan tumpang tindih program, pemborosan anggaran, dan rendahnya ketepatan sasaran bantuan. Data Kemenko PMK misalnya membuktikan bahwa setelah dilakukan integrasi data lintas lembaga, duplikasi program kemiskinan berhasil ditekan hingga 40 persen. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa	Hasil Penelitian ini signifikan karena membuktikan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga desa di Rato aspirasi masyarakat tidak terakomodasi, tidak sesuai rencana, serta partisipasi masyarakat rendah. Sebaliknya, ketika koordinasi dijalankan melalui desa, rapat evaluasi, dan sosialisasi terpadu, menjadi lebih terarah, sinergis, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat	Hasil penelitian di Kota Sukabumi membuktikan bahwa lemahnya koordinasi antar-lembaga menyebabkan penanganan ODGJ terlantar tidak efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kesatuan tindakan antar instansi, komunikasi yang minim, pembagian kerja yang tumpang tindih, serta kurangnya pedoman dan sarana rehabilitasi. Fakta tersebut menegaskan bahwa koordinasi yang solid merupakan faktor kunci agar kebijakan publik dapat terlaksana secara efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Koordinasi yang dilakukan melalui komunikasi yang intensif, pembagian tugas yang jelas, serta pertukaran informasi yang berkelanjutan antar pihak terkait mampu mendukung kelancaran proses pendataan, verifikasi, dan validasi calon penerima bantuan. Sebaliknya, lemahnya koordinasi sering menimbulkan perbedaan data, keterlambatan penyampaian informasi, serta ketidaksesuaia
--	--	--	---	--	--	---

	karena itu, penelitian ini signifikan sebagai rujukan dalam studi koordinasi lintas lembaga, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah.	daerah dan desa	koordinasi intensif mampu efisiensi anggaran dan memperluas jangkauan penerima manfaat, seperti pada program Keluarga Berencana yang kontribusinya terhadap efektivitas implementasi kebijakan mencapai 31,6 persen. Bahkan di tingkat pada			n dalam penetapan penerima manfaat yang berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Penelitian ini juga menemukan bahwa adanya kesepahaman antar lembaga mengenai prosedur dan mekanisme penyaluran bantuan dapat meminimalkan terjadinya kesalahan administrasi
Penjelasan Keunggulan penelitian yang kita lakukan (Research gap)	Berfokus pada koordinasi Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di tingkat kelurahan, khususnya pada integrasi peran antar instansi dalam proses pendataan, verifikasi.	Berfokus pada koordinasi pemerintahan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan menekankan pada faktor komunikasi, komitmen, dan kapasitas aparatur desa	Berfokus pada peran koordinasi lintas lembaga sebagai fondasi penting bagi efektivitas kebijakan kesejahteraan Masyarakat di Kota Jakarta	Berfokus pada koordinasi antar-lembaga desa Rato Kecamatan Waho Kabupaten Bima terkait penyatuan aspirasi masyarakat dan pencegahan tumpang tindih program	Berfokus koordinasi antar Lembaga terkait mekanisme integrasi tugas, komunikasi, dan pembagian peran antarinstansi untuk efektivitas kebijakan publik dan meminimal kerugian social.	Berfokus pada koordinasi kelembagaan dalam penyaluran BLT di Kecamatan Tambelang sebagai faktor penting dalam ketepatan sasaran bantuan sosial, mengisi kesenjangan penelitian terkait mekanisme

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan objek yang dikaji oleh peneliti, maka judul penelitian yang diajukan oleh penelitian yaitu “Koordinasi Kelembagaan Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi” layak untuk dikaji dan diteliti. Setelah memahami hasil penelusuran terdahulu maka, dapat diketahui tingkat keaslian dan keabsahan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Penelitian terdahulu menambah khazanah keilmuan yang dapat mendukung peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan orisinal. Serta adanya penelitian terdahulu dapat dijadikan panduan di dalam melakukan penelitian.

2.1.2 Kajian Terhadap *Grand Theory*

2.1.2.1 Konsep Administrasi

Ketika Administrasi ada, selalu ada pola pikir yang dijadikan pedoman untuk melakukan berbagai aktivitas manusia yang sengaja dilakukan agar pelaksanaan berbagai tindakan yang telah direncanakan sebelumnya tidak gagal. Sebagai bisnis atau kegiatan, administrasi berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan. Ada banyak tugas administrasi yang berada di bawah payung administrasi. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari membuat catatan hingga melakukan pembukuan sederhana hingga menyiapkan agenda. Administrasi digambarkan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu secara efisien dan efektif. Sebagai ilmuwan administrasi dan sebagai praktisi administrasi, kami selalu terlibat dalam proses konstruksi teori administrasi secara

berkesinambungan. Mengkaji administrasi dalam arti luas dalam bukunya “Administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.” **(Silalahi, 2016:7)**

Menurut definisi para ahli, administrasi adalah bentuk kerja sama manusia di mana rencana dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Administrasi dalam kenyataannya bertingkat-tingkat, dimulai dari gambaran yang paling luas dan berlanjut ke gambaran yang paling sempit, apakah kita melihat fokus kajiannya dengan menuntut pemikiran ilmiah ataukah kita melihatnya dari segi fokus kajiannya dengan mensyaratkan pemikiran ilmiah dan pemikiran ilmiah juga dalam pengertian lokus sebagai suatu kegiatan atau kegiatan yang hasilnya dapat memenuhi tuntutan hidup manusia.

Menurut **(Silalahi, 2016:5)** Administrasi didefinisikan:

“Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.”

Administrasi adalah pengumpulan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis untuk memudahkan dalam memperoleh data pada saat dibutuhkan di kemudian hari.

Menurut **Felix A. Nigro dan Lloyd G.** dalam **Pasolong, (2019:9)** mengemukakan bahwa sebagai berikut:

1. (*Public Administration*) is Cooperative group effort in public setting.
2. (Administrasi Publik) adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
3. (*Public Administration*) covers all three branches: executive, legislative and judicial, and their interrelationships.(Administrasi Publik) meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan di antara mereka.
4. (*Public Administration*) has an important role formulating of public policy and is thus a part of the political process.(Administrasi Publik) mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.
5. (*Public Administration*) is closely associated with numerous private groups and individuals in providing services to the community.(Administrasi Publik) sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
6. (*Public Administration*) is different in significant ways from private administration.(Administrasi Publik) dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif melalui penyelenggaraan pelayanan publik dan tercapainya tujuan negara.

Menurut **Rosenbloom** dalam **Pasolong, (2019:9)** mengemukakan bahwa sebagai berikut:

“Administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau bagian.”

Berdasarkan uraian di atas bahwa administrasi publik berkaitan dengan dunia eksekutif, yudikatif dan legislatif. Peneliti berpendapat bahwa administrasi publik yang berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik serta berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerja sama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah.

Berdasarkan dasarnya administrasi mempunyai peranan yang sangat krusial dan penting dalam menyelenggarakan pencapaian tujuan dalam proses administrasi negara maupun administrasi publik mengenai tugas-tugas pemerintah maupun merumuskan suatu kebijakan dalam sebuah negara. Administrasi negara, administrasi publik maupun manajemen merupakan sistem yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya.

Hal ini untuk mencapai suatu proses tujuan administrasi yang telah ditentukan dengan melibatkan dua orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu sasaran, maka dalam lingkup administrasi tidak terlepas dalam sebuah wadah organisasi untuk mencapai suatu sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.2.2 Konsep Administrasi Publik

Kehadiran administrasi dalam suatu negara merupakan suatu keharusan dan kebutuhan; administrasi adalah kumpulan norma dan keteraturan yang dapat digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat umum. Administrasi adalah kumpulan peraturan dan keteraturan yang dapat digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat umum. Namun, itu diubah menjadi layanan yang disponsori negara. Sekalipun negara benar-benar diselenggarakan untuk kepentingan rakyat, masyarakat dapat dianggap sebagai negara di satu pihak, dengan kepentingan masyarakat umum dilayani oleh pemerintah di pihak lain, sepanjang hal ini dilakukan sesuai dengan standar moral agama.

Administrasi publik merupakan bagian dari adanya perubahan di dalam khazanah keilmuan proses penyelenggaraan negara. Di mana sebelumnya

administrasi publik adalah administrasi negara, yang hanya berfokus pada proses pencapaian tujuan-tujuan negara sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam berbagai kebijakan, melalui instansi pemerintahan pusat dan instansi pemerintahan daerah sebagai motor penggeraknya.

Administrasi negara dan administrasi publik sama-sama berfokus pada pencapaian tujuan negara, namun terdapat perbedaan yang menjadi landasan dasar dalam basis penyelenggaraannya, yaitu di mana administrasi publik berorientasikan pada public service, sehingga kepentingan publik menjadi unsur yang paling diutamakan terutama di era transparansi pemerintahan saat ini. Administrasi publik memiliki ruang lingkup yang cukup luas di dalam ranah keilmuan, yaitu untuk mengatur mekanisme dan peranan negara dalam berkontribusi pada semua lini tata kelola pemerintahan. Seperti yang dikemukakan **Ahmad dalam Sellang, (2016:48)** ruang lingkup administrasi publik yaitu meliputi sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik
2. Birokrasi Publik
3. Manajemen Publik
4. Kepemimpinan
5. Pelayanan Publik
6. Kinerja
7. Etika Administrasi

Menurut **Hughes, dalam Revida dkk, (2020:3)** “administrasi publik merupakan aktivitas melayani publik dan atau aktivitas pelayanan publik dalam melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa administrasi publik adalah proses melayani publik, yang sesuai dengan implementasi kebijakan.

Sehingga dalam realitanya proses pelayanan publik harus disesuaikan dengan regulasi dan SOP yang berlaku.

Menurut **Pasolong**, dalam **Revida dkk, (2020:3)** “administrasi publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.”

Definisi tersebut mengandung makna implisit bahwa administrasi publik atau organisasi publik setiap anggotanya harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bobot tanggung jawab kinerja jabatan yang dimiliki. Administrasi publik merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan publik.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang disampaikan **Chandler dan Plano** dalam **Sellang, (2016:42)** “proses di mana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan dalam kebijakan publik.”

Administrasi publik melibatkan partisipasi sumber daya anggota organisasi. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi implementasi kebijakan yang telah ditetapkan bersamaan. Kebijakan yang diformulasikan melalui asas transparansi stakeholder terkait.

Berdasarkan yang di sampaikan **Dimock dan Koenig** dalam **Mindarti, 2016:4)** “administrasi publik dapat didefinisikan sebagai kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah.”

Pemahaman di atas memperlihatkan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan inti dari pemerintah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan tata

kelola pemerintahan. Namun dalam realitasnya administrasi publik melibatkan seluruh anggota kelompok yang memiliki tanggung jawab beban kerja pada setiap jabatan di dalam instansi pemerintahan.

Pemahaman tersebut selaras berdasarkan definisi yang diberikan oleh **Michael M. Harmon & Richard**, dalam **Sellang, (2016:42)** “administrasi tidak mengacu pada secara eksklusif kepada orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan pemerintah.”

Administrasi publik secara garis besar adalah seluruh rangkaian aktivitas yang berhubungan dengan persoalan publik, sehingga memiliki substansi pada pemberian pelayanan kepada publik, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dalam hal ini didominasi oleh instansi pemerintahan.

Administrasi publik menjadi unsur fundamental di dalam penyelenggaraan sistem birokrasi pemerintah.

Menurut **Gordon** dalam **Henry, (1993:21)** “Birokrasi pemerintah semakin dituntut untuk menerapkan unsur-unsur efisiensi agar penggunaan sumber daya berlangsung secara optimal di sektor publik. Selain itu dituntut adanya keahlian administratif sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang efisien, atau dengan perkataan lain pejabat dalam administrasi pemerintah dapat ditingkatkan menjadi lebih profesional.”

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan di atas mengarahkan pemerintah untuk menyelenggarakan sistem birokrasi yang prima dalam mengelola sumber daya, baik itu infrastruktur maupun sumber daya aparatur. Sumber daya

aparatur pemerintahan harus ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimilikinya masing-masing.

Menurut **Gordon** dalam **Henry, (1993:6)** “ciri dari administrasi publik tercermin dari definisi dan individu yang bertindak sesuai dengan peranan dan jabatan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.”

Pendapat tersebut secara eksplisit telah menyatakan bahwa di dalam proses administrasi publik, pola penyelenggaraan tata kelola birokrasi harus sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Sehingga setiap individu memiliki elektabilitas kinerja berdasarkan kewajiban beban kerja yang harus dipenuhi. Untuk mewujudkan birokrasi ideal sesuai dengan otoritas legal rasional, maka harus disesuaikan dengan prinsip penyelenggaraan administrasi publik yang sesuai dan relevan. Seperti yang dikemukakan oleh **Max Weber** dalam **Sellang, (2016:50)** mengemukakan prinsip-prinsip fundamental dari otoritas legal-formal sistem birokrasi administrasi publik sebagai berikut:

1. Pengorganisasian fungsi jabatan yang berkelanjutan dan ditetapkan dengan peraturan
2. Bidang kompetensi khusus yang meliputi kewajiban, otoritas dan sarana paksaan
3. Susunan jabatan yang mengikuti prinsip hierarki
4. Peraturan dan norma teknis untuk pelaksanaan jabatan
5. Pemisahan hak pribadi dan milik organisasi
6. Tidak ada pemberian yang terkait dengan posisi jabatan
7. Tindakan, keputusan dan peraturan tertulis

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa sistem manajerial kinerja instansi pemerintahan menjadi esensi krusial di dalam proses administrasi publik. Selain itu administrasi publik juga melingkupi mekanisme kerja manajemen

kepegawaian instansi pemerintahan serta manajemen kerja individu aparatur pada instansi pemerintah Sistem manajemen administrasi publik terus mengalami perubahan yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan dan anomali publik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang prima sesuai dengan dinamika penyelenggaraan negara dan sistem layanan publik yang dibutuhkan. Layanan publik bukan hanya melingkupi kebutuhan masyarakat saja, tetapi juga para stakeholder pemberi layanan.

2.1.2.3 Konsep Organisasi

Manusia pada hakikatnya tidak akan mampu hidup sendiri dan hampir sebagian besar tujuannya hanya dapat terpenuhi, apabila yang bersangkutan ada hubungannya dengan orang lain. Maka tidak heran, kalau orang lebih banyak berinteraksi dan berkomunikasi dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya, ketimbang hidup sendiri. Jadi, untuk menghilangkan kekurangan seseorang individu dalam mencapai tujuannya, maka ia perlu melibatkan diri dengan beberapa kelompok atau organisasi. Karena itu organisasi terbentuk, memang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai tujuan.

Organisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *organize* yang berarti membangun atau membentuk suatu kesatuan dari bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain. Dilihat dari segi ini, organisasi bisa berarti organisme, yang melakukan organizing, dan bisa juga berarti keluaran (product, output) organizing.

Menurut **John D. Millet** dalam **Inu Kencana Syafiie, (2017:44)** mengemukakan bahwa:

“Organization is the structural framework within which the work of many individuals is carried on for the realization of common purpose.(Maksudnya

organisasi adalah sebagai kerangka struktur di mana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama).”

Berdasarkan definisi di atas bahwa organisasi kerangka di mana kumpulan orang-orang bekerja dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut **Dwight Waldo** dalam **Inu Kencana Syafii**, (2017:46) mengemukakan bahwa:

“Organization is the structure of authoritative and habitual personal interrelations in a administrative system. (Maksudnya organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi).”

Berdasarkan teori di atas bahwa organisasi suatu organ yang di mana di dalamnya memiliki kewenangan serta budaya hubungan antara orang-orang dalam suatu sistem yang di dalamnya tercakup administrasi.

Menurut **Luther Gulick** dalam **Inu Kencana Syafii**, (2017:47)

“Organization is the means of interrelating the subdivisions of work by allotting them to man who are placed in a structure of authority, so that the work may be coordinated by orders of superiors to subordinates, reaching from the top to the bottom of the entire enterprise. (Maksudnya, organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, jadi demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha).”

Berdasarkan definisi diuraikan penulis berpendapat bahwa organisasi antara lain yaitu:

1. Organisasi sebagai wadah tempat terselenggaranya administrasi
2. Di dalam organisasi terdapat hubungan antara dua orang atau lebih, baik individu maupun kelompok
3. Adanya kerjasama dan pembagian tugas

4. Melakukan proses aktivitas yang sesuai dengan kinerja dan kewenangan yang diberikannya
5. Adanya tujuan bersama–sama yang ingin dicapai.

Organisasi terdapat sekumpulan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi, maka dalam mencapai tujuan dan sasarannya sebuah organisasi memiliki prinsip untuk melakukan pencapaian tujuan organisasi.

2.1.2.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan pola hubungan di antara posisi di dalam organisasi dan di antara anggota organisasi. Struktur organisasi memungkinkan penerapan proses manajemen dan menciptakan kerangka ketertiban dan perintah yang melalui itu struktur organisasi bisa direncanakan, diorganisasi, diarahkan dan dikendalikan. Menurut **Kaswan, (2021)** ada tiga dimensi dalam struktur organisasi yang meliputi:

1. Diferensiasi vertikal, yang menunjukkan lokasi penanggung jawab pembuat keputusan dalam struktur organisasi (yaitu sentralisasi atau desentralisasi) dan juga lapisan dalam hierarki (yaitu apakah struktur organisasi tinggi atau rata).
2. Diferensiasi horizontal, yang merujuk pada pembagian organisasi secara formal menjadi subunit-subunit.
3. Membangun mekanisme integrasi, yaitu mekanisme untuk mengoordinasikan subunit.

2.1.2.5 Konsep Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Bantuan sosial

diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kehidupan yang layak bagi warganya.

Menurut **Kemensos RI, (2020)** bantuan sosial adalah “pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang bersifat tidak terus-menerus dan selektif dengan tujuan melindungi dari risiko sosial Definisi ini menekankan bahwa bantuan sosial bersifat sementara dan ditujukan kepada kelompok sasaran tertentu.”

Menurut **Suharto, (2013)** menjelaskan bahwa “bantuan sosial merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang mengalami kondisi kerentanan sosial, kemiskinan, atau ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya Bantuan sosial berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat.”

Menurut **Todaro & Smith, (2011)** menyatakan bahwa “bantuan sosial merupakan bagian dari kebijakan pembangunan sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui intervensi pemerintah secara langsung”

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, bantuan sosial dapat dipahami sebagai bentuk intervensi pemerintah yang direncanakan dan terarah untuk membantu masyarakat yang mengalami risiko sosial, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, guna meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi beban sosial ekonomi masyarakat. Secara normatif, karakteristik bantuan sosial mengacu pada ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019**, yang menegaskan bahwa bantuan sosial:

1. Bersifat selektif dan ditujukan kepada kelompok sasaran tertentu.
2. Dilaksanakan berdasarkan data dan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Melibatkan berbagai lembaga pemerintah dalam proses pendataan, penyaluran, dan pengawasan. (Republik Indonesia, 2021)

2.1.2.6 Koordinasi kelembagaan dalam penyaluran bantuan sosial

Koordinasi kelembagaan dalam penyaluran bantuan sosial merupakan proses kerja sama antar lembaga pemerintah yang memiliki peran dan kewenangan berbeda dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang berhak secara efektif dan efisien.

Menurut **(Ndraha, 2015:112)** koordinasi kelembagaan adalah proses penyesuaian dan penyelarasan kepentingan antar lembaga agar pelaksanaan kebijakan publik dapat berjalan secara efektif dan tidak saling bertentangan. Dalam konteks bantuan sosial, koordinasi kelembagaan melibatkan dinas sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta pihak pendukung lainnya.

Koordinasi kelembagaan dalam penyaluran bantuan sosial mencakup:

1. Koordinasi pendataan dan validasi penerima bantuan.
2. Koordinasi pelaksanaan dan distribusi bantuan.
3. Koordinasi pengawasan dan evaluasi bantuan sosial.

2.1.2.7 Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata Bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengatur atau mengelola. Manajemen merupakan suatu proses pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Secara sederhana, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian setiap anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen Menurut **Sondang P. Siagian** dalam **Usman Effendi, (2014:4)** “Manajemen adalah kemampuan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa manajemen sangat menitikberatkan pada keahlian ataupun kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu di dalam organisasi demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut **James A.F. Stoner** dalam **Usman Effendi, (2014:4)**

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Definisi tersebut menyatakan bahwa proses kegiatan manajemen sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen, dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen dengan baik maka suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut **(Malayu S.P. Hasibuan, 2017)** menjelaskan bahwa “manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.”

Pendapat tersebut mengandung arti bahwa manajemen merupakan proses pendayagunaan sumber-sumber yang ada secara tepat sehingga tujuan dapat tercapai.

Manajemen merupakan suatu proses kerja sama yang dilakukan oleh individu atau lebih yang ada di dalam suatu organisasi dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengoordinasian, dan pengendalian yang dilakukan oleh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan

2.1.2.8 Konsep Fungsi Manajemen

Mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, diperlukannya fungsi-fungsi manajemen yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Konsep fungsi manajemen menurut **George R. Terry** dalam (**Usman Effendi, 2014:18**) “dikenal dengan istilah POAC yang meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling”. Kerangka ini menegaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses berkelanjutan yang dimulai dari perumusan rencana, pembentukan struktur kerja, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan terhadap hasil yang dicapai. Setiap fungsi memiliki peran yang saling terintegrasi dalam memastikan tujuan organisasi dapat diwujudkan secara terarah.

Menurut **The Liang Gie** dalam **Usman Effendi, (2014:4)** “fungsi manajemen tidak hanya terbatas pada empat tahapan tersebut. Ia mengemukakan enam fungsi manajemen yang dikenal dengan PDDCCI, yaitu planning, decision making, directing, coordinating, controlling, dan improving.” Pendekatan ini menunjukkan bahwa proses manajerial tidak hanya berkaitan dengan perencanaan dan pengawasan, tetapi juga mencakup aspek pengambilan keputusan strategis,

pengarahan sumber daya, koordinasi antarbagian, serta upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Pemahaman di atas memperlihatkan bahwa perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian merupakan serangkaian bagian-bagian dalam manajemen yang harus diaplikasikan sehingga tujuan dapat tercapai.

Pendapat di atas mengundang makna bahwa perencanaan, pengambilan keputusan, pengarahannya, pengkoordinasian, pengawasan, dan peningkatan merupakan kegiatan inti dalam mengelola suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya fungsi-fungsi manajemen mengandung beberapa unsur sebagai berikut: perencanaan (*planning*) yaitu suatu kegiatan yang membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pengorganisasian (*organizing*) yaitu kegiatan mengatur segala sumber daya yang ada dalam suatu organisasi, pengkoordinasian (*coordinating*) yaitu penyelarasan suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu yang ada di dalam organisasi, pengarahannya, (*directing*) yaitu proses memberikan petunjuk atau memberi gambaran serta motivasi kepada para anggota organisasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2.1.2.9 Unsur-Unsur Manajemen

Proses manajemen terdapat sejumlah unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yang apabila salah satunya tidak ada, maka proses manajemen tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik.

Menurut **Setyabudi Indartono, (2017)** mengemukakan unsur-unsur manajemen yang meliputi:

1. *Man*, merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi.
2. Manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang berkerja sama untuk mencapai tujuan.
3. *Money*, atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat (tools) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.
4. *Material*, terdiri dari bahan setengah jadi (raw material) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.
5. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efesiensi kerja.
6. *Method*, adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode saat dinyatakan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri.
7. *Market*, atau pasar adalah tempat dimana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) produknya. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli (kemampuan) konsumen.

2.1.3 Kajian Terhadap *Operasional Theory*

2.1.3.1 Koordinasi

Koordinasi menurut **Mintzberg** dalam **Sumiati, buku hasil desertasi berjudul Koordinasi Antar Lembaga Pengelola Transportasi Publik di Kota Bandung (2022:22)** mengemukakan:

“Koordinasi merupakan cara organisasi mengatur dan menyelaraskan berbagai aktivitas kerja agar tujuan dapat tercapai secara efektif. koordinasi diperlukan karena dalam organisasi terdapat pembagian kerja yang menimbulkan ketergantungan antar unit atau individu.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi merupakan upaya penyelarasan aktivitas antar unit kerja yang saling bergantung agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Tanpa adanya koordinasi, pembagian kerja dalam organisasi berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan tugas.

Menurut **Mintzberg (1979)**

“Koordinasi merupakan inti dari struktur organisasi yang berfungsi untuk menyatukan berbagai aktivitas kerja yang telah dibagi agar dapat berjalan secara terpadu dan efektif.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi merupakan mekanisme penting dalam organisasi yang digunakan untuk menyatukan berbagai aktivitas kerja yang telah dibagi ke dalam beberapa bagian atau unit kerja. Menurut Henry Mintzberg, koordinasi diperlukan agar setiap bagian organisasi dapat bekerja secara selaras dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut **Mintzberg (1979)**

“koordinasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu adanya integrasi terhadap pembagian kerja, dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti penyesuaian timbal balik, pengawasan langsung, serta standarisasi,

mengandung unsur komunikasi dan pengendalian, serta bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan struktur organisasi.”

Koordinasi bertujuan untuk mencapai efektivitas organisasi dengan menyatukan berbagai aktivitas kerja agar berjalan secara selaras dan terpadu.

Menurut Mintzberg (1983)

“Koordinasi merupakan unsur yang sangat penting dalam organisasi karena berfungsi untuk menyatukan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok kerja agar dapat bergerak menuju tujuan yang sama. Dalam sebuah organisasi, setiap anggota memiliki tugas, tanggung jawab, dan fungsi yang berbeda-beda.”

Perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian tindakan apabila tidak dihubungkan melalui suatu mekanisme koordinasi yang baik. Oleh karena itu, koordinasi diperlukan untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan organisasi sehingga tercipta keselarasan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Menurut Mintzberg (1983)

“Koordinasi merupakan inti dari struktur organisasi. Organisasi pada dasarnya dibentuk oleh berbagai bagian yang saling bergantung satu sama lain sehingga membutuhkan mekanisme yang mampu menghubungkan seluruh bagian tersebut. Tanpa koordinasi, organisasi akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan karena setiap unit kerja cenderung bekerja sendiri-sendiri sesuai kepentingannya masing-masing.”

Koordinasi memungkinkan berbagai aktivitas yang berbeda dapat diselaraskan sehingga menghasilkan kinerja organisasi yang efektif dan efisien.

Menurut Mintzberg (1983)

”Koordinasi tidak hanya berkaitan dengan komunikasi antar individu, tetapi mencakup proses pengaturan hubungan kerja, pembagian tugas, pengawasan, standarisasi pekerjaan, pengembangan kompetensi, serta pembentukan nilai dan norma bersama dalam organisasi.”

Dengan adanya koordinasi, setiap anggota organisasi dapat memahami perannya, mengetahui batas kewenangannya, serta mampu bekerja sama dengan pihak lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut **Mintzberg (1983)**

“Semakin kompleks suatu organisasi, semakin besar pula kebutuhan akan koordinasi. Organisasi yang melibatkan banyak aktor, unit kerja, dan tingkatan kewenangan memerlukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur agar tidak terjadi tumpang tindih tugas, konflik kewenangan, kesalahan komunikasi, maupun pemborosan sumber daya.”

Oleh karena itu, koordinasi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas organisasi.

Menurut **Mintzberg (1983)**

“Koordinasi sebagai proses integrasi berbagai aktivitas yang saling bergantung. Setiap bagian organisasi tidak dapat bekerja secara terpisah karena keberhasilan suatu bagian sering kali bergantung pada bagian lainnya. Dalam kondisi tersebut, koordinasi berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dapat berjalan secara selaras dan saling mendukung.”

Dengan demikian, koordinasi tidak hanya berperan sebagai alat pengendalian organisasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kerja sama yang produktif antar anggota organisasi.

Menurut **Mintzberg (1983)**

“Koordinasi merupakan mekanisme yang memungkinkan organisasi menghadapi perubahan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas. Melalui koordinasi, organisasi dapat melakukan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan, mengatasi hambatan yang terjadi, serta mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat.”

Oleh karena itu, koordinasi menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan suatu organisasi.

Menurut **Mintzberg (1983)**

“Koordinasi memiliki peran yang sangat penting karena pelaksanaan program pemerintah umumnya melibatkan banyak lembaga dan pemangku kepentingan. Setiap lembaga memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi agar pelaksanaan program dapat berjalan secara terpadu.”

Tanpa koordinasi yang baik, pelaksanaan program berpotensi mengalami keterlambatan, ketidaktepatan sasaran, konflik kewenangan, maupun rendahnya efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut **(Ndraha, 2015:290)**

“Dari sudut normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja”.

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa koordinasi adalah kegiatan penggerakkan dan penyelarasan kegiatan agar berjalan terarah sehingga terciptanya efektivitas kerja guna tercapainya tujuan yang ditetapkan.

Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, koordinasi dimaksudkan agar adanya penyelarasan sumber daya manusia dan sumber lain yang dimiliki suatu organisasi.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Koordinasi

Jenis-jenis koordinasi sebagaimana yang dikemukakan oleh, **(Hasibuan, 2019:86-87)** koordinasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain

1. Koordinasi vertikal (vertical coordination) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan, yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-

unit, kesatuan-kesatuan kerja ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya

2. Koordinasi horizontal (horizontal coordination) adalah mengoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan, yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan. dalam tingkat organisasi (aparatur) yang singkat

Sementara itu, Sugandha sebagaimana dalam Moekijat, (1994:31-32)

mengemukakan bahwa ada beberapa jenis koordinasi antara lain

1. Koordinasi internal, yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit dalam suatu organisasi.
2. Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi.
3. Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan antar pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau organisasi yang setingkat.
4. Koordinasi vertikal yaitu koordinasi antar pejabat-pejabat unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasnya atau unit tingkat atasnya langsung.
5. Koordinasi diagonal. yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkinya.
6. Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi, atau karena koordinatornya mempunyai fungsi tertentu.

Berkaitan dengan jenis-jenis koordinasi, dari **Sumiati, buku hasil disertasi berjudul Koordinasi Antar Lembaga Pengelola Transportasi Publik di Kota Bandung (2022:102)** menyatakan bahwa salah satu jenis koordinasi adalah koordinasi lintas fungsi. “Koordinasi lintas fungsi ditentukan melalui Strategi Koordinasi, Mekanisme Koordinasi, Unsur Karakter Jaringan Koordinasi “

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa dalam jenis koordinasi lintas fungsi dapat memberikan sebuah petunjuk keberhasilan dalam sebuah koordinasi. Karena dalam koordinasi lintas fungsi terdapat strategi koordinasi yang dimana harus dilakukan untuk berbagai pihak yang terlibat supaya bekerja bersama secara efektif, kemudian bagaimana mekanisme dalam sebuah

koordinasi, serta unsur karakter jaringan koordinasi yang nantinya dapat mempengaruhi efektivitas koordinasi antar individu dalam suatu jaringan. Sehingga proses koordinasi yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar.

2.1.3.3 Cara-Cara Mengadakan koordinasi

Sebagaimana yang dikemukakan oleh **(Hasibuan, 2019:88)** mengemukakan bahwa ada beberapa cara-cara mengadakan koordinasi yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.
2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama.
3. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran, dan lain sebagainya.
4. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan pencapaian sasaran.
5. Membina human relations yang baik antar sesama karyawan
6. Manajer sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan

2.1.3.4 Pentingnya Koordinasi dalam Suatu Organisasi

Menurut **(Malayu S.P Hasibuan, 2019:86)** ada beberapa alasan mengapa koordinasi dapat dikatakan penting di dalam suatu organisasi, antara lain:

1. Untuk menghindari terjadinya ketidakteraturan, konflik antarpegawai, serta tumpang tindih maupun kekosongan dalam pelaksanaan tugas.
2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan.
3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
4. Supaya semua unsur manajemen (6M) dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
4. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

Pendapatan di atas secara eksplisit telah menyatakan bahwa dalam organisasi yang baik terdapat sistem koordinasi yang baik sehingga untuk mencapai

tujuan bersama itu tidak bisa dilakukan oleh satu bagian organisasi. Saja akan tetapi dibutuhkan keselarasan seluruh bagian di dalamnya.

2.2 Kerangka Berpikir

Koordinasi menurut **Mintzberg** dalam **Sumiati, buku hasil desertasi berjudul Koordinasi Antar Lembaga Pengelola Transportasi Publik di Kota Bandung (2022:24)** mengemukakan bahwa:

“Koordinasi merupakan cara organisasi mengatur dan menyelaraskan berbagai aktivitas kerja agar tujuan dapat tercapai secara efektif. koordinasi diperlukan karena dalam organisasi terdapat pembagian kerja yang menimbulkan ketergantungan antar unit atau individu.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi merupakan upaya penyelarasan aktivitas antar unit kerja yang saling bergantung agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. tanpa adanya koordinasi, pembagian kerja dalam organisasi berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan tugas.

Agar koordinasi dapat berlangsung dengan baik dalam organisasi maka diperlukan adanya mekanisme koordinasi, menurut **Mintzberg** dalam **Sumiati buku hasil desertasi berjudul Koordinasi Antar Lembaga Pengelola Transportasi Publik di Kota Bandung 2022:25-26)** terdapat lima mekanisme koordinasi yang penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung dalam organisasi. Kelima mekanisme koordinasi tersebut adalah:

1. Penyesuaian Bersama (*mutual adjustment*). Penyesuaian Bersama dapat mencapai koordinasi kerja dengan proses komunikasi informal yang sederhana. dalam penyesuaian bersama, kontrol pekerjaan terletak di tangan pekerja. Oleh karenanya mutual adjustment hanya dapat diimplementasikan pada organisasi dengan skala kegiatan yang kecil dan sederhana. Namun demikian dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti pada situasi organisasi yang kompleks dengan skala kegiatan yang lebih besar pun. penyesuaian

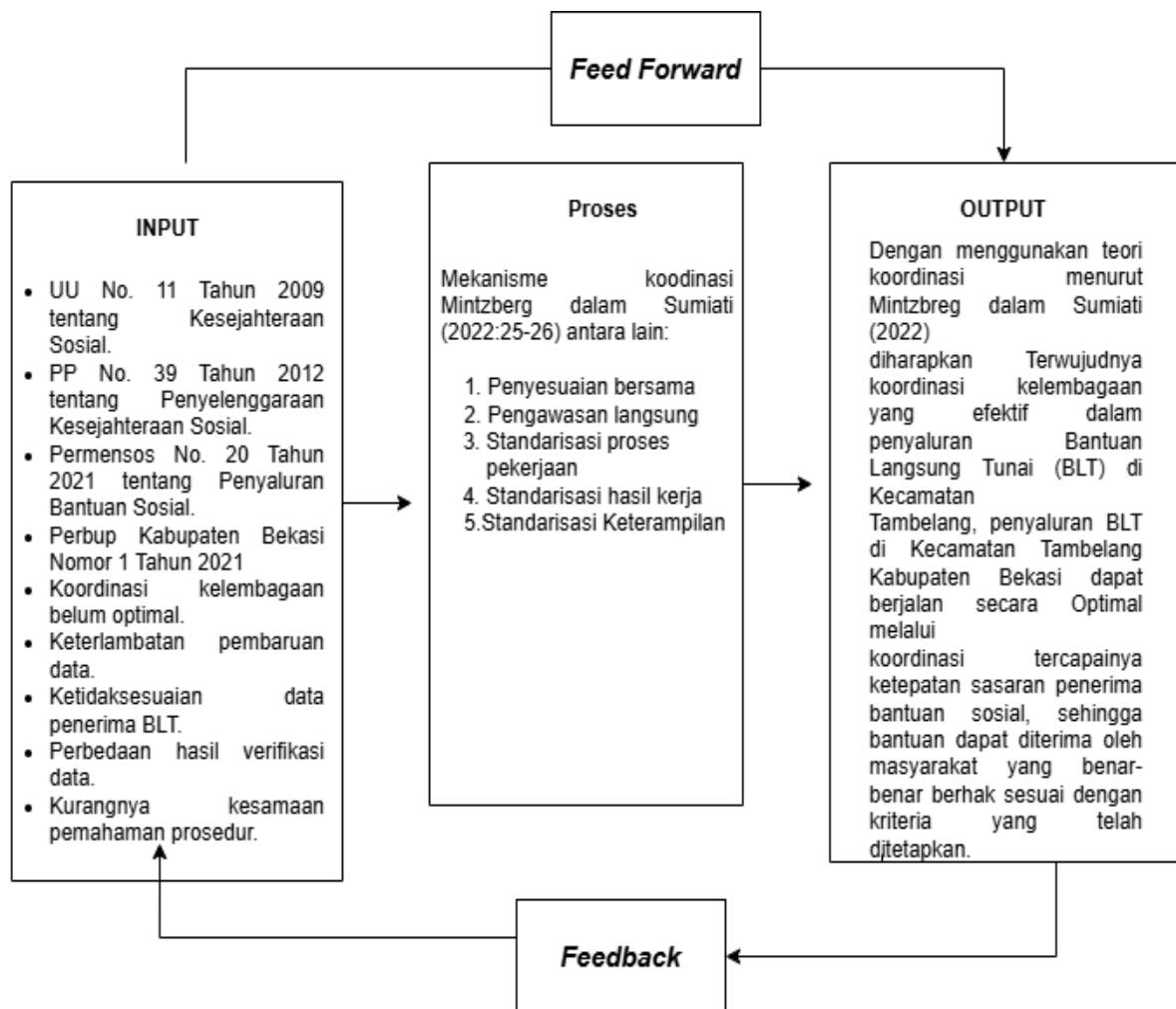
bersama dapat mencapai koordinasi kerja. Oleh karena itu mekanisme ini cocok digunakan pada lingkungan dinamis dan kompleks.

2. Pengawasan langsung (*direct supervision*). Mekanisme pengawasan ini mencapai langsung digunakan pada organisasi besar. Mekanisme ini mencapai koordinasi dengan cara mengangkat seseorang untuk bertanggung jawab atas hasil pekerjaan beberapa pekerja, memberikan perintah dan mengawasi kegiatan mereka, mekanisme ini dapat diterapkan pada lingkungan yang sederhana dan dinamis.
3. Standarisasi proses pekerjaan (*standardization of work processes*). Standarisasi ini dapat dilakukan apabila isi pekerjaan bersifat spesifik atau telah diprogram sebelumnya. dalam kondisi kerja seperti ini, para pekerja tidak memerlukan pengawasan langsung maupun komunikasi informal, karena semuanya tergantung dari desain pekerjaan itu sendiri. Standarisasi proses digunakan pada lingkungan sederhana dan statis.
4. Standarisasi hasil kerja (*standardization of work outputs*). Kinerja distandarisasi ketika terdapat hasil kerja. Dengan standarisasi kinerja, proses diantara pelaksanaan kegiatan sudah ditentukan terlebih dahulu. Standarisasi hasil digunakan pada lingkungan sederhana dan statis.
5. Standarisasi keterampilan (*standardization of worker skills*). Keterampilan dan pengetahuan distandarkan melalui pelatihan sebelum memasuki organisasi untuk menghasilkan kerja yang baik Secara umum, individu diberi pelatihan sebelum dia bergabung dengan sebuah organisasi.

Sehingga dalam rangka Koordinasi Kelembagaan dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi akan berhasil bilamana memperhatikan lima cara-cara mengadakan mekanisme koordinasi.

Untuk Memudahkan dalam memahami penelitian ini. Peneliti membuat kerangka berpikir yang disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah Peneliti (2026)

2.3 Proposisi

Berdasarkan uraian pada kerangka berpikir, maka proposisi dari penelitian ini adalah Koordinasi Kelembagaan dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, melalui mekanisme Penyesuaian Bersama, Pengawasan Langsung, Standarisasi proses pekerjaan, Standarisasi hasil kerja, Standarisasi Keterampilan.